ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TERHADAP KESEHATAN MENTAL MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO

Oleh

Siti Marwiyah¹, Mega Yolanda², Khoirina Rizeki³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo

Email: yolandamega99@gmail.com

Abstrak

Pada saat awal tahun 2020, masyarakat di dunia dihebohkan akan adanya pandemi dari Virus Corona (Covid-19) sehingga dapat menimbulkan kejadian yang tidak biasa. Banyak orang sudah terinfeksi dengan virus covid-19 ini, bahkan banyak yang meninggal. Untuk di Indonesia saat ini, pemerintah telah berusaha dalam memberikan imbauan serta berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia untuk mengatasi wabah ini agar program pemerintah tersebut bisa berjalan secara efektif dan juga efisien, seperti program pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat. (PPKM). Namun fakta saat ini masih banyak masyarakat di Indonesia yang menganggap enteng nasehat ini. Implementasi kebijakan PPKM berdampak besar terhadap kesehatan jiwa yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Maka penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis mengapa beberapa orang memunculkan perilaku tersebut dan bagaimana memperbaikinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan melalui pendekatan secara deskriptif analisis. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwasanya selain menganalisis perilaku masyarakat Indonesia dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) serta cara penanganannya. Jadi Jurnal ini juga akan memaparkan mengenai cara dalam menjaga kesehatan pada mental masyarakat.

Kata Kunci : Covid-19, Kesehatan Mental, Kebijakan Publik, PPKM

PENDAHULUAN

Kesehatan mental merupakan peran penting dalam psikologi manusia yang berkaitan dengan mental seseorang yang dimana mental itu adalah pikiran yang dapat membuat individu berpikir kritis terhadap kehidupan sosialnya. Lingkungan yang sehat dapat memberikan mental yang baik dalam sebuah ruang lingkup masyarakat. Dengan ini Kesehatan mental tidak bisa dianggap remeh oleh setiap orang karena memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan dalam bersosialisasi kepada masyarakat yang dimana harus mendapat perhatian penting dalam menangani. Kesehatan mental juga sangat penting di perhatikan selayaknya kesehatan pada fisik manusia, dari peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Replikasi Sistem Pembinaan Bagi Penderita

Gangguan Jiwa di Kota Probolinggo. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan Psikologi terhadap 8 orang yang dinilai mengalami gangguan jiwa yakni salah satunya diduga perempuan tersebut sedang dalam mengandung dan masih banyak lagi gangguan jiwa yang tidak bisa disebutkan. Kebijakan PPKM berlangsung dimulai sejak tanggal 3 juli 2021 hingga sampai kebijakan terbaru oleh pemerintah yang akan di perpanjang, Dalam Mengenai penerapan PPKM harus ditangani dan ditindak lanjuti secara serius dan melihat sejauh mana perkembangan mengenai kebijakan PPKM terhadap mental seseorang selama pandemic covid-19 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Mendengar dari suara masyarakat khususnya di Kota Probolinggo dengan berbagai metode penelitian kami yakni

wawancara online/offline serta Observasi, bahwa menurut masyarakat kondisi mereka sedang tidak baik-baik saja dan tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut karena bagi mereka dari segi perekonomian juga dibatasi oleh pemerintah membuat dagangannya sepi, dikhawatirkan masyarakat nantinya tidak bisa membiayai anaknya sekolah yang berada di pesantren menurut masyarakat Kota Probolinggo.

Menurut WHO (World Health Organization), Menegaskan mengenai kesehatan mental yang dimana dapat membuat kondisi seseorang mengalami stress yang diakibatkan oleh pikiran-pikiran yang dapat mengganggu secara psikologinya. Terdapat 450 juta orang yang mengalami gangguan mental akibat tidak bisa mengolah daya pikirnya secara baik serta kasus yang terjadi di Negara Indonesia terhadap kesehatan mental sebanyak 9.162.886 atau 3,7% dari populasi. Menurut peraturan tentang PPKM Jawa-Bali yakni "Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat" bagaimana pemerintah untuk menangani hal tersebut yaitu dengan cara pembinaan atau pemberdayaan terhadap sekelompok orang yang memiliki gangguan mental agar dapat mengolah emosi yang tidak mengganggu kesehatan mentalnya. Pertama, dapat memberikan kebutuhan yang dapat memadai baik secara kesehatan fisik dan kesehatan psikologinya sehingga memiliki peran yang sama dengan orang lain yang tidak memiliki gangguan mental untuk berargumen dalam mengemukakan pendapatnya dan terbebas dari hal kebodohan dan kesakitan dalam menangani kesehatan mental yang terganggu.. Kedua, memberikan motivasi terhadap masyarakat mengenai Kebijakan Pemerintah tujuan diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini untuk apa dan dampaknya bagaimana pada psikologi anak remaja ataupun orang dewasa. Secara luas gangguan mental yang berlebihan dan tidak ditangani akan berdampak pada

gangguan jiwa sehingga masalah ini dapat menimbulkan dampak negative terhadap Negara serta pemerintah. Pada dasarnya mental seseorang tidaklah selalu sama sehingga tidak bisa disamaratakan dalam menangani kesehatan mental lainnya. Karena dalam pembahasan kesehatan mental ini dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan secara individual maupun kelompok lainnya. Dalam kehidupan masyarakat yang sehat serta memiliki semangat dalam hidupnya akan dapat merasakan kesembuhan dan relaksi diri mereka yang dapat mengolah emosional secara baik sehingga secara tidak langsung membuat pola hidup damai.

Menurut Winarno, 2005 : 27 , Analisis dalam kebijakan yang akan dibentuk untuk mengetahui fenomena yang ada dalam menangani masalah-masalah sosial serta memberikan solusi yang baik terhadap masalah tersebut. Salah satu solusi yang penting adalah dengan adanya dukungan dari keluarga yang memberikan bantuan individu yakni berupa partisipasi, emansipasi, motivasi, dan interaksi pada lingkungan yang positif. Dari analisis penelitian kami terhadap masyarakat yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mental bahwa ada kolerasi positif yang signifikan antara Kebijakan Pemerintah dengan Masyarakat terhadap kesehatan mental antara dua topik tersebut sangat bermakna dalam hidup kesehatan mental harus sesuai dan sejalan, kebijakan belum tentu dari publik, masalah publik belum tentu kebijakan.

LANDASAN TEORI

1. Analisis adalah usaha untuk menjabarkan suatu permasalahan yang kemudian dapat dipahami akar masalahnya (Satoroni dan Komariyah 20014:200). Sedangkan menurut sugiono (2015:335) Analisis adalah suatu kegiatan untuk mencari pola atau cara menentukan hubungan antar bagian serta hubungan dengan keseluruhan.

2. Covid-19 adalah penyakit yang dapat menularkan yang diakibatkan dari beberapa varian coronavirus yang muncul. Virus covid-19 yang berasal dari Wuhan membuat resah masyarakat khususnya Indonesia. Covid-19 muncul akibat virus yang menyerang alat pernafasan yang dapat mengakibatkan kematian atau gangguan kesehatan lainnya yang akan berdampak buruk bagi penderitanya menurut Richard Sutejo. Serta dijelaskan juga menurut WHO bahwa covid-19 juga dapat menularkan melalui hidung dan saat batuk yang dapat memicu penularan covid-19.
3. Kesehatan mental adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mengalami erasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan dan kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidup seseorang serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya menurut teori Pieper dan Uden (2006)
4. Kebijakan Publik adalah suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu yang ada, dan berkembang di masyarakat. Kebijakan Publik juga merupakan keputusan yang dibuat pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu (to do or not). Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan

untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dan kriteria level yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria yang dirinci lebih lanjut dalam Inmendagri tersebut. Berdasarkan definisi dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tersebut Inmendagri Nomor 14 Tahun 2021 memilikitujuan dalam hal pengaturan lebih ketat dalam pembatasan aktivitas masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis kualitatif, objek yang ada di penelitian ini ialah suatu fenomena atau kejadian alam dan kenyataan sosial. Seluruh kegiatan yang dilakukan peneliti dalam merumuskan permasalahan sehingga dapat menarik kesimpulan disebut metode penelitian (Sugiyono,2009:1). Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik mulai dari wawancara sampai observasi. Penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek secara alamiah, dalam hal ini peneliti sebagai pusat kunci dalam mengumpulkan dan analisis sebuah data hasil dari penelitian disebut dengan metode kualitatif.

Penelitian yang dilakukan dalam mengumpulkan data berupa wawancara, observasi lapangan serta panduan dokumen wawancara dilakukan agar mendapatkan informasi yang jelas terhadap narasumber dan membuat pertanyaan yang berfokus pada objek penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam wawancara berupa informasi yang diketahui dan dilakukan secara terstruktur. Kegiatan yang dilakukan ke objek penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung agar dapat mengetahui lebih

jelas kegiatan yang akan dilakukan artinya observasi (Ridwan, 2004:104). Pengamatan dilakukan secara langsung atau observasi di lapangan dan informasi yang diperoleh lebih akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian juga dapat dilakukan dengan menggunakan dokumentasi agar mendapatkan data atau gambaran mengenai objek yang akan dilakukan penelitian. Suatu data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan di teliti disebut dengan data primer penelitian yang bersumber dari literatur buku dan sudah diolah dalam bentuk sudah jadi disebut dengan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Winarno, 2005 : 27 , analisis kebijakan yaitu bentuk penelitian terapan yang akan di jadikan untuk mencapai tingkat pengetahuan lebih mendalam mengenai isu sosial yang memberikan solusi yang lebih baik lagi . Pandemic ovid-19 juga virus yang sangat berbahaya bagi kesehatan, di awal bulan maret tahun 2019 virus corona resmi masuk ke Indonesia serta menghebohkan masyarakat seluruh negara khususnya di Kota Probolinggo itu sendiri kelompok yang rentan terkena yakni anak kecil dan lansia, kemungkinan seluruh dunia 200 negara yang terjangkit virus tersebut. Tingginya angka kematian yang ada di Indonesia saat ini juga dipengaruhi oleh penyakit bawaan yang di miliki masyarakat yang positif corona virus bukan hanya dari itu saja melainkan dari fasilitas kesehatan yang kurang maksimal seperti oksigen, dan ruangan untuk pasien yang positif covid-19. Sehingga kesulitan menangani kasus tersebut yang setiap harinya selalu ada pasien yang positif covid-19, tingginya angka kematian masyarakat Kota Probolinggo sebanyak 143.000 jiwa yang meninggal dunia pada saat pandemic covid-19 ini, tidak hanya gejala dan penyakit fisik saja tetapi juga kesehatan mental yang sekarang banyak sekali kita jumpai di Kota Probolinggo seperti, adanya tekanan dalam melakukan interaksi langsung.

Dalam penjelasan undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan mental secara umum yaitu undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap orang bisa hidup sejahtera lahir dan batin dengan mendapatkan pelayanan yang baik dalam kesehatan mereka oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah PPKM membuat masyarakat Kota Probolinggo juga mengalami frustrasi menurut wawancara kepada salah satu masyarakat remaja, yang dimana frustrasi tersebut menimbulkan kemarahan yang kemudian yang menjadi tingkah laku agresif. Masyarakat juga harus mempunyai pembelajaran bahwa agresivitas tidak murni banyak kegiatan yang menyebabkan kesehatan mental seseorang terganggu kemungkinan berdasarkan mereka sering menghabiskan aktifitas di rumah dan interaksi secara langsung berkurang.

Kebijakan PPKM ini terdapat kebijakan Pemerintah untuk menekankan penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat. Penelitian kami ini agar mengatasi penyebaran covid-19 yang semakin luas, Pemerintah berupaya mensosialisasikan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekankan penularan. Untuk sektor yang masih beroperasi adalah instansi, pemerintah, layanan kesehatan, pasar dll. Dan kebijakan PPKM ini banyak masyarakat yang menjadikan peluang usaha jualan online dan UMKM, selain itu juga kebijakan Pemerintah memberikan kelonggaran PPKM sehingga warung makan, pedagang kaki lima, dll membatasi waktu berjualan dimulai pukul 08.00-20.00 WIB. Pemerintah Kota Probolinggo telah membantu tambahan anggaran dalam program pemulihan ekonomi nasional, khususnya di bidang kesehatan dan perlindungan sosial, akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Dalam situasi PPKM ini Pemerintah Kota Probolinggo melakukan kegiatan program sembako dengan menggunakan kartu syarat pengambilan,

program keringanan pada Listrik, dan Kuota Internet untuk di bidang pendidikan seperti SD, SMP, SMA/SMK, dan Mahasiswa, bantuan beras, bantuan Uang Rp. 200.000-300.000 yang dapat meringankan perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19. Menurut pandangan masyarakat terhadap PPKM adalah masyarakat tidak ingin peraturan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di perpanjang lagi karena berdampak kepada ekonomi masyarakat Kota Probolinggo. Dapat berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat. Apalagi Bantuan yang diberikan Pemerintah seperti bansos, uang dll tidak cukup memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Menurut masyarakat, jika tidak adanya PPKM Darurat bisa menyebabkan penyebaran virus corona menyebar dengan cepat ke berbagai masyarakat, dan orang yang terkena Virus Corona ini semakin banyak. Pada dasarnya dengan adanya PPKM Darurat ini di harapkan dapat menurunkan angka Covid-19. Karena itu PPKM Darurat ini perlu untuk dilanjutkan dengan catatan jaminan sosial yang cukup dan memadai untuk masyarakat walau pada kenyataannya PPKM Darurat ini mempunyai berbagai dampak yang dihasilkan. Survei yang dihasilkan dalam kesehatan mental seseorang dan rasa gejala cemas adalah mereka yang merasa khawatir terhadap sesuatu yang buruk akan terjadi kepada mereka Contohnya gangguan tidur, lelah, kehilangan minat untuk beraktivitas dan malas untuk mengerjakan sesuatu. Dalam kebijakan ini masyarakat juga mempunyai banyak kejadian yang dialami. Semua memiliki banyak resiko seperti bisa mengakibatkan depresi dan untuk mereka yang hidup dalam kesendirian resiko yang diakibatkan akan terasa besar untuk mereka oleh karena itu di Kota Probolinggo sendiri dalam kesehatan mental ini dapat meningkatkan dan memperbanyak angka bunuh diri dengan berbagai faktor yan diakibatkan oleh Virus Covid-19 ini. Pada Stigma dan diskriminasi ini juga yang menjadi suatu bagian lain selain

resiko tugas yang harus ditanggung terhadap kesehatan mental masyarakat terutama terhadap tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk mengurangi psikologi masyarakat yang terguncang mentalnya, dalam hal ini Pemerintah juga harus memberikan pelayanan kesehatan yang memadai terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Probolinggo mencakup pelayanan kesehatan yang memadai dengan ini dapat mendorong kepercayaan publik terkait penanganan Virus covid-19. Dalam situasi seperti ini pada saat Pandemic Covid-19 penanganan VIRUS Covid-19 harus cepat ditangani sebagai mana yang tertuang pada peraturan Pemerintah melalui Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2021 yang kemudian direvisi lagi dalam Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020. Dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berisi tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Virus Covid-19. Hasil dari isi keputusan tersebut menjadi dasar kebijakan pada implikasi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa masyarakat masih belum bisa menerima kebijakan PPKM ini karena dengan adanya kebijakan tentang PPKM membuat aktifitas masyarakat yang dilakukan di luar rumah menjadi berkurang dan merasa ada batasan untuk semua hal. Kebijakan dalam penanggulangan Covid-19 dan sejumlah protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh Pemerintah, maka pemerintah harus lebih bisa mengoptimalkan integrasi layanan dalam kesehatan mental yang sudah ada di dalam sistem kesehatan nasional tersebut guna memulihkan kesehatan mental masyarakat sehingga dapat membuat masyarakat dapat menerima adanya kebijakan PPKM yang diterapkan oleh Pemerintah. Saran bagi peneliti terhadap kebijakan PPKM di Kota Probolinggo yang dilakukan dengan kerja keras adalah untuk mencari suatu solusi bersama agar dapat memulihkan kondisi dari Pandemic Covid-19 itu sendiri. Diharapkan dalam hal ini agar bisa menjadi lebih baik lagi untuk selanjutnya. Disiplin untuk melakukan

sesuatu, seperti protokol kesehatan merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan dan ditegaskan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyebaran virus yang menyebar dengan pesat lebih luas di kalangan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan PPKM ini terdapat kebijakan Pemerintah untuk menekankan penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat. Dalam mengatasi kasus ini yang semakin luas penyebarannya diharapkan untuk menjaga kesehatan dan hidup bersih, Kebijakan Pemerintah juga berupaya mengencarkan sosialisasi pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekankan penulanan. Terutama yang penting bagi masyarakat terus mengikuti kebijakan dari Pemerintah sampai penyebaran itu dengan angka cara mencegahnya yakni memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sudah melakukan vaksinasi satu sampai dua.

Dengan adanya kebijakan PPKM Jawa-Bali dapat membuat masyarakat beraktivitas yang dilakukan diluar rumah menjadi berkurang, seperti adanya penerapan bekerja dari rumah ini diberlakukan oleh Pemerintah Kota untuk mengatasi penyebaran covid-19. Adapun masyarakat kecil menengah di kota Probolinggo yang berjualan di tempat-tempat umum ikut terdampak karena pemerintah mengeluarkan aturan jam operasional dimulai pukul 08.00-20.00 WIB. dalam situasi PPKM ini Pemerintah Kota Probolinggo melakukan kegiatan berbagai program Pemerintah selama pandemic covid-19 yakni sembako, keringanan dalam membayar pajak, dan bantuan uang Rp. 200.000-300.000 yang dapat membantu masyarakat dalam perekonomian yang terdampak covid-19, tidak hanya hal itu Pemerintah juga harus bisa menjamin kebutuhan mereka sehari-hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, yakni Dosen Pengampu maupun Review pada jurnal ini. Untuk peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si selaku pemberi dana dalam penelitian kami, terima kasih kepada Tim Review Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Tribhuwana Tungadewi, terima kasih untuk Bapak Faid yang sudah membantu dalam penulisan jurnal, dan terima kasih dari pihak masyarakat yang sudah memberikan waktunya untuk di wawancarai mengenai judul penelitian kami. Semoga dalam penelitian berikutnya diharapkan lebih baik lagi dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] (Ayuningtyas et al., 2018; Hidup et al., 2020; ILMAR & SH, 2020; Ilpaj & Nurwati, 2020; Joharudin et al., 2020; Juaningsih et al., 2020; Kariem, 2020; Karim et al., 2018; Nurkholis, 2020; penyunting, Eko A. Meinarno, 2018; *Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Replikasi Sistem Pembinaan Bagi Penderita Gangguan Jiwa Di Kota Probolinggo*, 2017; Rizal et al., 2021; Tuwu, 2020; Yunus & Rezki, 2020) Ayuningtyas, D., Misnaniarti, M., & Rayhani, M. (2018). Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(1). <https://doi.org/10.26553/JIKM.2018.9.1.1-10>
- [2] Hidup, H. K., Dukungan, D., Bukhori, B., Keluarga Dengan, S., Ilpaj, S. M., & Nurwati, N. (2020). Respon Masyarakat Terhadap Covid 19 - Kampus Terbaik di Sumatera Utara. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28123>
- [3] ILMAR, D. R. A., & SH, M. H. (2020). *Memahami Kebijakan Pemerintah:*

- Dalam Menangani COVID-19.* books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=ug3uDwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA57%5C&dq=kebijakan+pemerintah%5C&ots=c6AiSKGp2d%5C&sig=01ndAErJ2i6kIP9bhKpLVcQHHys>
- [4] Ilpaj, S. M., & Nurwati, N. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 16.
<https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28123>
- [5] Joharudin, A., Septiadi, M. A., Maharani, S., & ... (2020). panic syndrom covid-19: penekanan terhadap kebijakan yang diberikan. *Jurnal* <http://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/63>
- [6] Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & ... (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial*
<https://core.ac.uk/download/pdf/325992751.pdf>
- [7] Kariem, M. Q. (2020). Konsep Kebijakan Pemerintah Di Era New Normal. *TheJournalish: Social and Government*.
<http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/22>
- [8] Karim, M. I. T., Moenta, A. P., & Riza, M. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional. *Amanna Gappa*.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/6338>
- [9] Nurkholis, N. (2020). Dampak Pandemi Novel-Corona Virus Disiase (Covid-19) Terhadap Psikologi Dan Pendidikan Serta Kebijakan Pemerintah. *Jurnal PGSD*.
<https://ojs3.umc.ac.id/index.php/JPS/article/view/1035>
- [10] penyunting, Eko A. Meinarno, S. W. S. (2018). *Psikologi sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2018 2018, 2009 Penerbit Salemba Humanika.
- [11] *Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Replikasi Sistem Pembinaan Bagi Penderita Gangguan Jiwa Di Kota Probolinggo*. (2017). 2007, 1–101.
- [12] Rizal, M., Afrianti, R., & Abdurahman, I. (2021). Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Pelaku Bisnis Coffe shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta The Impact of the Policy for Implementing Community Activity Restrictions for Coffee Shop Busi. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 97–105.
- [13] Tuwu, D. (2020). Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*.
- [14] Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan pemberlakuan lock down sebagai antisipasi penyebaran corona virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*.
https://www.researchgate.net/profile/Nur-Yunus/publication/340103987_Kebijakan_Pemberlakuan_Lock_Down_Sebagai_Antisipasi_Penyebaran_Corona_Virus_Covid-19/links/5e8734ce4585150839ba0cce/Kebijakan-Pemberlakuan-Lock-Down-Sebagai-Antisipasi-Penyebaran-Corona-
- [15] Ayuningtyas, D., Misnaniarti, M., & Rayhani, M. (2018). Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(1).
<https://doi.org/10.26553/JIKM.2018.9.1.1-10>
- [16] Hidup, H. K., Dukungan, D., Bukhori, B., Keluarga Dengan, S., Ilpaj, S. M., &

- Nurwati, N. (2020). Respon Masyarakat Terhadap Covid 19 - Kampus Terbaik di Sumatera Utara. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28123>
- [17] ILMAR, D. R. A., & SH, M. H. (2020). *Memahami Kebijakan Pemerintah: Dalam Menangani COVID-19*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=ug3uDwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA57%5C&dq=kebijakan+pemerintah%5C&ots=c6AiSKGp2d%5C&sig=01ndAerJ2i6kIP9bhKpLVcQHHy>
- [18] Ilpaj, S. M., & Nurwati, N. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Indonesia. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28123>
- [19] Joharudin, A., Septiadi, M. A., Maharani, S., & ... (2020). panic syndrom covid-19: penekanan terhadap kebijakan yang diberikan. *Jurnal ...* <http://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/63>
- [20] Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & ... (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial* <https://core.ac.uk/download/pdf/325992751.pdf>
- [21] Kariem, M. Q. (2020). Konsep Kebijakan Pemerintah Di Era New Normal. *TheJournalish: Social and Government*. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/22>
- [22] Karim, M. I. T., Moenta, A. P., & Riza, M. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional. *Amanna Gappa*. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/6338>
- [23] Nurkholis, N. (2020). Dampak Pandemi Novel-Corona Virus Disiase (Covid-19) Terhadap Psikologi Dan Pendidikan Serta Kebijakan Pemerintah. *Jurnal PGSD*. <https://ojs3.umc.ac.id/index.php/JPS/article/view/1035>
- [24] penyunting, Eko A. Meinarno, S. W. S. (2018). *Psikologi sosial*. Jakarta : Salemba Humanika, 2018 2018, 2009 Penerbit Salemba Humanika.
- [25] *Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Replikasi Sistem Pembinaan Bagi Penderita Gangguan Jiwa Di Kota Probolinggo*. (2017). 2007, 1–101.
- [26] Rizal, M., Afrianti, R., & Abdurahman, I. (2021). Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Pelaku Bisnis Coffe shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta The Impact of the Policy for Implementing Community Activity Restrictions for Coffee Shop Busi. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 97–105.
- [27] Tuwu, D. (2020). Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*.
- [28] Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan pemberlakuan lock down sebagai antisipasi penyebaran corona virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. https://www.researchgate.net/profile/Nur-Yunus/publication/340103987_Kebijakan_Pemberlakuan_Lock_Down_Sebagai_Antisipasi_Penyebaran_Corona_Virus_Covid-19/links/5e8734ce4585150839ba0cce/Kebijakan-Pemberlakuan-Lock-Down-Sebagai-Antisipasi-Penyebaran-Corona-